



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAMALUDIN
2. Jabatan : KEPALA SATGAS POL. PP KEC. DUREN SAWIT
3. NHK : 951766

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.050.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 52 m ² /120 m ² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m ² /122 m ² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	169.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1,5 S AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
2. MOTOR, HONDA C100 Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
4. MOTOR, KAWASAKI EX250L / SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
5. MOTOR, YAMAHA 20P-R AT / SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	56.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	62.132.115

**F. HARTA LAINNYA****Sub Total**

Rp. ----

Rp. 1.337.332.115

III. HUTANG

Rp. 750.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 587.332.115

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpн.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpн.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.